EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang: Analisis Data BPS 2022-2026

Angga Sanita Putra[1], Irvan Yoga Pardistya[2], Andini Nurul Hidayah[3], Amba Wulan[4]
[1,2,3,4]Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: angga@fe.unsika.ac.id[1], irvan.yoga@fe.unsika.ac.id[2], 2510630030031@student.unsika.ac.id[3], 2510630030030@student.unsika.ac.id[4]

Article History:
Received: 13 Juli 2026
Revised: 02 November 2026
Accepted: 17 November 2026

Keywords: *MBG; Pengangguran Terbuka; Tenaga Kerja; Karawang*

Abstract: *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak Januari 2025 melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya dirancang sebagai instrumen perbaikan gizi, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal lewat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyerap tenaga kerja setempat dan melibatkan UMKM sebagai pemasok pangan. Artikel ini menelaah sejauh mana MBG memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karawang dengan menggunakan data Sakernas BPS Karawang Agustus 2022 – Agustus 2025 serta penelusuran laporan skala operasional SPPG melalui pendekatan deskriptif-kuantitatif komparatif yang memadukan analisis tren time-series dengan sintesis literatur kebijakan. Temuan menunjukkan TPT Karawang menurun dari 9,87 persen (2022) menjadi 7,99 persen (2025), namun laju penurunan melambat tajam pada tahun peluncuran MBG, sementara jumlah absolut penganggur stagnan di kisaran seratus ribu jiwa, sedangkan skala penyerapan tenaga kerja MBG yang pada tahap awal hanya puluhan pekerja per dapur dinilai jauh dari cukup untuk memberi pengaruh statistik berarti terhadap angkatan kerja Karawang yang melampaui 1,3 juta orang. Artikel menyimpulkan penurunan TPT lebih ditopang transformasi struktural menuju sektor jasa dan pemulihan investasi industri ketimbang MBG semata, sehingga klaim dampak positif program ini masih memerlukan bukti empiris lebih kokoh sebelum dijadikan dasar evaluasi kebijakan.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri manufaktur terbesar secara nasional, sehingga seringkali wilayah ini dijadikan objek penelitian pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (Anggiasari Alfirdani Putri & Muhammad Yasin, 2026). Walaupun statusnya sebagai

kawasan industri, hal ini tidak membuat Kabupaten Karawang bebas dari pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah ini konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat maupun nasional selama beberapa tahun terakhir, dengan angka 9,87 persen pada Agustus 2022 (BPS Kabupaten Karawang, 2023). Kesenjangan antara pertumbuhan investasi industri dan penyerapan tenaga kerja lokal ini menyiratkan adanya persoalan struktural yang tidak sepenuhnya terselesaikan oleh derasnya arus modal ke kawasan industri.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional sejak Januari 2025, dengan alokasi awal Rp71 triliun dalam APBN 2025 (Suardi & Purmadani, 2025). Program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) ini semula diarahkan mengatasi gizi buruk dan stunting pada anak sekolah, santri, balita, serta ibu hamil dan menyusui, namun kemudian juga disematkan harapan sebagai penggerak ekonomi lokal. Setiap dapur SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 47 tenaga kerja, dengan target 30.000 unit SPPG secara nasional (Pusat Investasi Pemerintah, 2025). Pada awal 2026, sekitar 21.000–22.000 dapur SPPG telah beroperasi, dengan estimasi penyerapan tenaga kerja langsung hampir satu juta orang, ditambah efek berganda terhadap UMKM pemasok bahan pangan (Antara News Bengkulu, 2026).

Di Karawang, implementasi MBG dimulai dengan pendistribusian 3.000 paket makanan melalui satu dapur umum TNI yang melibatkan 51 tenaga kerja lokal (Antara News, 2025). Perluasan program berikutnya turut melibatkan yayasan dan lembaga swadaya, seperti di Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, yang menekankan perekrutan tenaga kerja dari warga sekitar (Idisi Online, 2025). Narasi optimistis ini memunculkan pertanyaan empiris: apakah kehadiran MBG benar-benar tercermin dalam perbaikan TPT Karawang, ataukah penurunan yang teramati lebih merupakan kelanjutan tren pemulihan ekonomi pasca pandemi dan transformasi struktural yang sudah berlangsung sebelumnya?

Research Gap

Kajian dampak ekonomi MBG berkembang pesat dalam dua tahun terakhir, namun sebagian besar terpusat pada tiga ranah: (1) dampak gizi dan pendidikan, seperti kehadiran siswa dan penurunan stunting (Qomarrullah dkk., 2025; Widyasari dkk., 2025); (2) dampak makro ekonomi agregat nasional melalui pendekatan SNSE yang mensimulasikan investasi Rp71 triliun tanpa menurunkan analisis hingga level kabupaten (Pratiwi dkk., 2025); dan (3) kajian kualitatif-deskriptif pemberdayaan UMKM di sekitar dapur SPPG pada skala studi kasus tertentu, misalnya di Makassar (Kahar dkk., 2025) atau Gorontalo (Koton dkk., 2025).

Masih jarang ditemukan penelitian yang menautkan data TPT tingkat kabupaten dari BPS dengan realitas skala operasional MBG di wilayah bersangkutan. Bahkan diakui bahwa bukti empiris terukur mengenai keterkaitan belanja MBG dengan indikator perekonomian lokal masih sangat terbatas (Mursalin dkk., 2026). Kekosongan ini penting diisi di Karawang, wilayah dengan basis manufaktur besar berdampingan dengan pengangguran yang persisten tinggi, sehingga menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan perubahan angka ketenagakerjaan tanpa serta-merta mengatribusikannya pada satu program saja.

Artikel ini disusun dengan tiga tujuan. Pertama, memetakan tren TPT Kabupaten Karawang dari Agustus 2022 hingga Agustus 2025 untuk melihat pola sebelum dan sesudah peluncuran MBG. Kedua, mengestimasi proporsi penyerapan tenaga kerja yang riil dapat diatribusikan pada operasional MBG di Karawang, baik langsung melalui dapur SPPG maupun tidak langsung melalui UMKM pemasok, lalu membandingkannya dengan skala angkatan kerja dan pengangguran terbuka setempat. Ketiga, melakukan analisis kritis untuk menilai apakah

penurunan TPT lebih tepat dijelaskan oleh kontribusi MBG ataukah faktor struktural dan siklikal lain, seperti pergeseran ke sektor jasa, pemulihan investasi industri, maupun dinamika kebijakan pengupahan daerah. Artikel ini diharapkan memberi kontribusi metodologis berupa kerangka evaluasi berbasis data resmi yang dapat direplikasi pada daerah lain untuk menilai klaim dampak ekonomi program serupa secara lebih objektif.

LANDASAN TEORI

Konsep dan Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator baku yang digunakan BPS untuk menggambarkan proporsi angkatan kerja yang sedang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan, dihitung dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan dua kali setahun, yakni Februari dan Agustus, meskipun untuk estimasi hingga tingkat kabupaten/kota hanya periode Agustus yang memiliki jumlah sampel memadai (BPS Kabupaten Karawang, 2025). Secara teoritis, tinggi rendahnya TPT dipengaruhi oleh interaksi antara laju pertumbuhan angkatan kerja dan kemampuan perekonomian menciptakan lapangan kerja baru; ketika pertumbuhan kesempatan kerja tidak mampu mengimbangi pertambahan angkatan kerja, tekanan pengangguran akan meningkat meskipun perekonomian secara agregat tumbuh positif (Siti Fatimah Azzahra dkk., 2024). Pemahaman ini penting sebagai pijakan analitis sebab penurunan persentase TPT tidak otomatis berarti berkurangnya jumlah absolut penduduk yang menganggur, terutama apabila Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turut meningkat akibat masuknya penduduk baru ke pasar kerja.

Teori Permintaan Agregat dan Belanja Pemerintah sebagai Instrumen Penyerapan Tenaga Kerja

Kerangka Keynesian menjadi rujukan utama untuk memahami logika di balik klaim bahwa program belanja sosial seperti MBG dapat menurunkan pengangguran. Prinsip yang dikemukakan Bent Hansen menekankan peran pemerintah dalam mendorong permintaan agregat guna mencapai kondisi mendekati kesempatan kerja penuh, sehingga peningkatan belanja publik, subsidi tenaga kerja, dan dukungan UMKM diyakini mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus menekan pengangguran (Muttaqim dkk., 2025). Dalam model IS-LM, kebijakan fiskal ekspansif akan menggeser kurva IS ke kanan sehingga tercipta keseimbangan baru dengan output lebih tinggi, yang mendorong penggunaan faktor produksi termasuk tenaga kerja (Yeniwati dkk., 2025). Sejalan dengan itu, teori efek pengganda menjelaskan bahwa satu rupiah pengeluaran pemerintah berpotensi menghasilkan peningkatan output lebih dari satu rupiah melalui rantai belanja yang berputar di perekonomian, meskipun besarannya sangat bergantung pada kebocoran (leakage) belanja ke luar wilayah sasaran, misalnya melalui pengadaan bahan baku dari luar daerah (Saputra & Cita, 2023).

Namun literatur juga mengingatkan bahwa besaran efek penyerapan tenaga kerja dari belanja pemerintah sangat bergantung pada jenis dan skala proyek. Proyek padat karya seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan energi terbukti menciptakan lapangan kerja signifikan pada tahap konstruksi sekaligus menumbuhkan aktivitas ekonomi turunan (Putri dkk., 2025), sementara program berbasis layanan sosial dengan struktur tenaga kerja informal atau kerelawanan (sebagaimana banyak posisi di dapur SPPG) cenderung menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas per unit operasional dan lebih berperan sebagai jaring pengaman ekonomi mikro ketimbang mesin penciptaan lapangan kerja formal berskala besar. Kebijakan moneter ekspansif turut berperan sebagai stimulus awal, sebagaimana ditunjukkan pengaruh positif jumlah uang beredar dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara suku bunga kredit tinggi

justru berpengaruh negatif (Suriyati & Hendra Riofita, 2026), sehingga penyerapan tenaga kerja pada dasarnya merupakan hasil interaksi berbagai kebijakan makroekonomi, bukan produk satu instrumen kebijakan sosial semata.

Penelitian Terdahulu tentang Bantuan Sosial, Pengangguran, dan Kemiskinan

Sejumlah kajian terdahulu telah menelaah hubungan antara program bantuan sosial dan indikator ketenagakerjaan maupun kemiskinan di Indonesia. Ridha dkk. (2021) menemukan bahwa bantuan sosial yang dipadukan pemberdayaan UMKM berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Parepare, meski efeknya lebih terasa pada perbaikan daya beli ketimbang penciptaan lapangan kerja formal baru. Sinaga dkk. (2022) juga mendokumentasikan dampak positif perlindungan sosial terhadap penurunan kemiskinan di Sumatera Utara, namun menggarisbawahi bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan skala anggaran. Salsabila dkk., (2024) menemukan bahwa penurunan kemiskinan pasca pandemi tidak dapat dilepaskan dari kombinasi berbagai program, sehingga sulit mengisolasi kontribusi satu program tunggal terhadap perbaikan indikator sosial-ekonomi agregat.

Pada isu yang lebih spesifik, Tsabitah (2025) menegaskan bahwa TPT tetap menjadi determinan utama kemiskinan meskipun bantuan sosial telah digulirkan secara masif, yang mengindikasikan bahwa bantuan sosial cenderung berperan sebagai peredam dampak pengangguran ketimbang solusi struktural atas pengangguran itu sendiri. Temuan ini relevan sebagai pijakan kehati-hatian dalam menilai klaim dampak MBG, sebab pola serupa berpotensi terulang: program dapat memberi manfaat nyata bagi penerima manfaat dan pelaku UMKM sekitar dapur SPPG, tanpa harus tercermin signifikan pada penurunan angka pengangguran terbuka secara agregat di tingkat kabupaten.

Penelitian Terdahulu Tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Literatur yang secara spesifik mengkaji MBG berkembang cepat sepanjang 2025–2026, sejalan dengan skala dan kecepatan peluncuran program ini. Suardi & Purmadani (2025) menganalisis MBG dari perspektif pertumbuhan ekonomi daerah dan menyimpulkan bahwa harapan pemerintah agar UMKM tumbuh melalui program ini cukup besar, meski dampak riilnya belum signifikan pada tahap awal implementasi. Simulasi SNSE pada level nasional menunjukkan bahwa investasi MBG Rp71 triliun berpotensi menggeser pendapatan sektoral dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga, terutama melalui sektor industri pengolahan makanan dan minuman (Pratiwi dkk., 2025), namun model agregat semacam ini tidak dirancang untuk menangkap variasi dampak antar kabupaten yang berbeda karakteristik pasar kerjanya.

Pada level mikro, Koton dkk. (2025) mendokumentasikan bagaimana MBG di Gorontalo mengaktivasi rantai pasok sekunder melalui pelibatan UMKM, sehingga UMKM lokal berpotensi memperoleh kontrak lebih stabil. Studi lain di Makassar menunjukkan peningkatan pelanggan dan omzet UMKM sekitar sekolah penerima MBG, namun turut mengidentifikasi risiko ketergantungan pelaku usaha terhadap keberlanjutan program serta potensi persaingan tidak sehat antar-UMKM (Kahar dkk., 2025). Widyasari dkk. (2025) menegaskan perlunya evaluasi MBG yang memperhitungkan implikasi ganda terhadap kesehatan anak sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal, sementara Dwijayanti (2024) menyoroti efek jaringan kebijakan MBG terhadap sektor pertanian sebagai pemasok komoditas primer. Sarjito (2024) memosisikan MBG sebagai bagian dari strategi pengembangan SDM untuk ketahanan nasional, sedangkan Fatimah dkk. (2024) mengingatkan bahwa implementasi MBG di Indonesia Timur masih menghadapi tantangan infrastruktur dan ketahanan pangan yang berbeda dibandingkan Pulau Jawa.

Dalam konteks internasional, bukti dari program makan siang sekolah skala besar di Ghana menunjukkan efektivitas intervensi ini dalam memperbaiki status gizi anak, tercermin dari

peningkatan tinggi badan menurut usia pada anak perempuan dan rumah tangga miskin, melalui uji acak terkendali berskala klaster (Gelli dkk., 2019). Studi ini menegaskan bahwa manfaat utama program makan bergizi berbasis sekolah secara konsisten teruji pada ranah kesehatan dan pendidikan, bukan penciptaan lapangan kerja formal berskala besar, sehingga menjadi pembanding penting bagi ekspektasi berlebihan terhadap dimensi ketenagakerjaan MBG di Indonesia.

Konteks Struktural Ketenagakerjaan Karawang

Karawang memiliki struktur pasar kerja yang khas: sektor jasa menyerap porsi terbesar sebesar 55,92 persen pada Agustus 2024, diikuti manufaktur 32,22 persen dan pertanian 11,85 persen (BPS Kabupaten Karawang, 2024), menandakan pergeseran struktural dari citra Karawang sebagai kawasan manufaktur murni menuju perekonomian yang semakin ditopang sektor jasa. Fenomena upah minimum juga relevan sebagai konteks kebijakan ketenagakerjaan daerah, mengingat penelitian mengenai pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum yang tidak diimbangi produktivitas dapat menekan minat pelaku usaha menambah tenaga kerja baru, terutama pada sektor padat karya (Andriany dkk., 2025). Karawang, dengan Upah Minimum Kabupaten yang tergolong tinggi karena basis industrinya, berpotensi menghadapi dilema serupa: investasi industri terus mengalir, tetapi elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan investasi cenderung menurun seiring otomatisasi dan kenaikan biaya tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-kuantitatif yang dipadukan dengan sintesis literatur kebijakan (descriptive quantitative design with policy literature synthesis), yaitu desain yang menggambarkan fenomena berdasarkan data apa adanya tanpa memanipulasi variabel (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk membangun model kausal formal, melainkan untuk memetakan tren, membandingkan skala, dan menilai kewajaran klaim dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karawang berdasarkan data resmi yang tersedia hingga saat penelitian dilakukan.

Sumber data yang digunakan seluruhnya bersifat sekunder, terdiri atas tiga kelompok. Pertama, data ketenagakerjaan resmi Kabupaten Karawang, yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,95 persen pada Agustus 2023 (BPS Kabupaten Karawang, 2023), turun menjadi 8,04 persen pada Agustus 2024 (BPS Kabupaten Karawang, 2024), dan kembali turun tipis menjadi 7,99 persen pada Agustus 2025 (BPS Kabupaten Karawang, 2025), yang dilengkapi dengan gambaran angkatan kerja nasional pada periode yang sama sebagai pembanding. Kedua, data mengenai skala operasional MBG secara nasional, mencakup rilis Badan Gizi Nasional yang menyebutkan sekitar 21.000 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan diperkirakan menyerap 987.000 tenaga kerja langsung (Antara News Bengkulu, 2026), dengan tambahan estimasi tiga hingga empat juta tenaga kerja tidak langsung melalui sekitar 40.000 UMKM pemasok (Antara News Bengkulu, 2026); skema pembiayaan pembangunan dapur SPPG melalui UMKM yang dijalankan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan (Pusat Investasi Pemerintah, 2025); serta hasil survei bersama BPS dan Badan Gizi Nasional yang mengkonfirmasi program ini turut menciptakan lapangan kerja baru melalui operasional dapur SPPG (Badan Gizi Nasional, 2026). Ketiga, artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan, mencakup analisis efektivitas kebijakan MBG

(Agustini & Mulyani, 2025) serta tinjauan nilai gizi program bagi anak sekolah (Syamsu dkk., 2025), yang diperoleh melalui penelusuran basis data jurnal daring.

Teknik analisis data yang digunakan mencakup tiga tahap. Tahap pertama adalah analisis tren time-series sederhana atas data TPT dan indikator ketenagakerjaan Karawang, dengan membandingkan laju perubahan tahun ke tahun (year-on-year) sebelum periode peluncuran MBG (2022–2024) dan sesudahnya (2024–2025) menggunakan rangkaian data resmi BPS Kabupaten Karawang, guna melihat apakah terdapat perubahan pola yang mencolok pada periode implementasi MBG. Tahap kedua adalah analisis proporsi, yaitu membandingkan estimasi 987.000 tenaga kerja langsung dan tiga hingga empat juta tenaga kerja tidak langsung yang terserap melalui operasional SPPG secara nasional, serta skema pembiayaan pembangunan dapur yang mendukung perluasannya, terhadap total angkatan kerja dan jumlah pengangguran terbuka di tingkat kabupaten, untuk menilai signifikansi skala kontribusi program. Tahap ketiga adalah analisis kualitatif-kritis yang menyandingkan temuan kuantitatif dengan kerangka teoritis permintaan agregat dan bukti dari penelitian terdahulu (Agustini & Mulyani, 2025; Syamsu dkk., 2025), guna menilai kewajaran atribusi kausal terhadap MBG dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor struktural dan siklikal lain yang bekerja secara simultan.

Penelitian ini menyadari sejumlah keterbatasan metodologis yang penting diungkapkan secara transparan. Pertama, karena MBG baru diluncurkan secara nasional pada Januari 2025, data Sakernas yang mencerminkan kondisi setelah program berjalan penuh satu tahun kalender baru tersedia untuk periode Agustus 2025, sehingga jendela pengamatan pasca implementasi masih relatif pendek untuk menarik kesimpulan definitif mengenai dampak jangka menengah dan panjang. Kedua, hingga naskah ini disusun, tidak tersedia publikasi resmi yang konsisten mengenai jumlah pasti dapur SPPG yang beroperasi secara aktif di Kabupaten Karawang pada setiap titik waktu, sehingga peneliti hanya dapat mengandalkan titik data yang terdokumentasi dalam pemberitaan resmi. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan model regresi panel atau pendekatan eksperimental seperti difference-in-differences yang mampu mengisolasi efek kausal MBG dari faktor pengganggu (confounding factors) lainnya, sehingga seluruh kesimpulan yang disampaikan bersifat deskriptif-interpretatif dan perlu diperlakukan sebagai hipotesis awal yang terbuka untuk diuji lebih lanjut menggunakan data yang lebih granular di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang 2022–2025

Data resmi BPS Kabupaten Karawang mencatat TPT sebesar 9,87 persen pada Agustus 2022, turun menjadi 8,95 persen pada Agustus 2023 (BPS Kabupaten Karawang, 2023), lalu 8,04 persen pada Agustus 2024 (BPS Kabupaten Karawang, 2024), dan 7,99 persen pada Agustus 2025 (BPS Kabupaten Karawang, 2025). Laju penurunan pada dua periode pertama relatif konsisten, masing-masing 0,92 dan 0,91 poin persentase per tahun, namun pada 2025 tahun pertama penuh implementasi MBG penurunan hanya 0,05 poin persentase. Perlambatan ini menjadi catatan kritis pertama: jika MBG mendorong penyerapan tenaga kerja secara berarti, penurunan TPT semestinya terakselerasi, bukan melambat, sehingga faktor lain (kemungkinan pemulihan investasi manufaktur dan ekspansi sektor jasa) yang selama ini menopang tren tersebut tampaknya mulai kehilangan momentum.

Catatan kritis kedua muncul dari angka absolut. Pada Agustus 2024, angkatan kerja Karawang tercatat 1,25 juta orang dengan 1,15 juta bekerja, menyisakan penganggur berkisar seratus ribu orang lebih (BPS Kabupaten Karawang, 2024). Pada Agustus 2025, angkatan kerja naik menjadi 1,30 juta orang dengan 1,19 juta bekerja, sementara jumlah pengangguran tercatat

103,60 ribu orang. TPAK turut naik dari 63,67 persen menjadi 65,13 persen, menandakan derasnya arus masuk angkatan kerja baru. Akibatnya, persentase TPT membaik tipis, tetapi beban pengangguran absolut relatif stagnan.

Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja MBG terhadap Angkatan Kerja Karawang

Pada hari pertama peluncuran MBG di Karawang, hanya beroperasi satu dapur umum yang dikelola TNI dengan 51 tenaga kerja lokal untuk mendistribusikan sekitar 3.000 paket makanan (Antara News, 2025). Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, sejumlah dapur SPPG baru dilaporkan tengah dibangun oleh yayasan, misalnya di Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, yang masih dalam tahap konstruksi ketika berita diturunkan (Idisi Online, 2025). Karena tidak tersedia basis data resmi mengenai jumlah kumulatif dapur aktif di Karawang, penelitian ini menggunakan estimasi: Badan Gizi Nasional secara resmi menyatakan setiap dapur SPPG membutuhkan sekitar 47 relawan untuk operasional pelayanan, dengan total sekitar 21.000 dapur yang telah beroperasi menyerap hampir satu juta tenaga kerja langsung secara nasional (Antara News Bengkulu, 2026). Dengan asumsi rasio nasional tersebut turut berlaku di Karawang, dan seandainya sepuluh hingga dua puluh dapur beroperasi di kabupaten ini pada pertengahan 2026, estimasi penyerapan langsung berkisar 470–940 orang.

Ditambah efek tidak langsung melalui UMKM pemasok rata-rata 15 pemasok per dapur dengan tiga hingga lima pekerja masing-masing total estimasi penyerapan langsung dan tidak langsung berkisar 2.500-7.000 orang. Angka ini setara 2,4-6,8 persen dari 103,60 ribu penganggur Karawang pada Agustus 2025, dan kurang dari satu persen dari total angkatan kerja 1,30 juta orang (Raka, 2026). Skala ini menegaskan bahwa sekalipun estimasi paling optimistis terealisasi penuh, dampaknya terhadap TPT kabupaten akan sulit terdeteksi secara statistik apalagi jika sebagian pekerja dapur SPPG sesungguhnya berpindah dari sektor informal lain (job switching), bukan benar-benar keluar dari status penganggur terbuka.

Analisis Kualitatif-Kritis atas Klaim Dampak MBG

Sektor jasa kini menyerap tenaga kerja terbesar (55,92 persen pada 2024), mengungguli manufaktur (32,22 persen), dan proporsi pekerja formal naik 16,01 persen menjadi 48,55 persen pada periode yang sama (BPS Kabupaten Karawang, 2024) pertumbuhan jauh lebih besar dan terstruktur dibanding skala penyerapan MBG. Kebijakan upah minimum yang tidak sebanding dengan produktivitas juga dapat menekan minat pelaku usaha menambah tenaga kerja (Andriany dkk., 2025), sehingga Upah Minimum Kabupaten Karawang yang tergolong tinggi berpotensi menjadi faktor struktural tersendiri di luar MBG.

Menyandingkan seluruh temuan: sebelum MBG (2022–2024) TPT Karawang turun konsisten hampir satu poin persentase per tahun seiring pemulihan pasca pandemi; sesudah MBG (2024–2025) penurunan melambat drastis menjadi 0,05 poin sementara pengangguran absolut stagnan akibat kenaikan TPAK. Dibaca naif, data ini bisa keliru disimpulkan sebagai bukti MBG berkorelasi negatif dengan pasar kerja kesimpulan yang terlalu sederhana. Yang lebih tepat: data yang tersedia belum memberi bukti kuat bahwa MBG berkontribusi signifikan terhadap TPT Karawang, bukan berarti MBG pasti tidak berdampak. Skala operasionalnya (4.2) memang masih terlampau kecil untuk terdeteksi pada indikator agregat, pola yang konsisten dengan program bantuan sosial lain di Indonesia yang lebih berperan meredam dampak pengangguran dan memperbaiki daya beli ketimbang menjadi solusi struktural (Ridha dkk., 2021; Tsabitah, 2025). Perlambatan TPT 2025 kemungkinan besar lebih dipengaruhi faktor di luar MBG, seperti perlambatan investasi manufaktur dan derasnya arus masuk angkatan kerja baru.

Penting dibedakan dampak MBG pada level mikro-lokal misalnya kenaikan omzet UMKM pemasok di sekitar dapur SPPG sebagaimana ditemukan di Gorontalo (Koton dkk., 2025) dan

Makassar (Kahar dkk., 2025) dengan dampak makro-kabupaten pada indikator seperti TPT; keduanya tidak selalu berbanding lurus, sejalan dengan simulasi nasional yang menunjukkan dampak MBG lebih terasa pada level sektoral agregat ketimbang kabupaten individual (Pratiwi dkk., 2025), maupun bukti dari program sejenis di negara lain yang manfaat utamanya konsisten pada ranah kesehatan dan pendidikan anak, bukan penciptaan lapangan kerja formal (Gelli dkk., 2019). Mengingat jendela pengamatan yang baru mencakup satu titik data pasca implementasi (Agustus 2025), kesimpulan artikel ini bersifat sementara dan perlu diperkaya oleh data Sakernas Agustus 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dapat dibaca secara naif sebagai bukti keberhasilan suatu program, terutama ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turut meningkat secara signifikan. Data resmi BPS Kabupaten Karawang periode 2022–2025 mencatat TPT menurun dari 9,87 persen (Agustus 2022) menjadi 7,99 persen (Agustus 2025). Namun, laju penurunan yang semula konsisten hampir satu poin persentase per tahun (2022–2024) melambat tajam menjadi hanya 0,05 poin pada tahun pertama penuh implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara jumlah absolut penganggur relatif stagnan di kisaran seratus ribu orang akibat derasnya arus masuk angkatan kerja baru. Estimasi skala penyerapan tenaga kerja MBG di Karawang baik langsung melalui dapur SPPG maupun tidak langsung melalui UMKM pemasok berkisar 2.500–7.000 orang, atau setara 2,4–6,8 persen dari total pengangguran kabupaten dan kurang dari satu persen dari total angkatan kerja. Skala ini jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan sektor jasa dan sektor formal pada periode yang sama, sehingga transformasi struktural pasar kerja Karawang menuju sektor jasa dan dinamika kebijakan pengupahan daerah menjadi penjelasan yang lebih meyakinkan atas tren penurunan TPT dibandingkan kontribusi langsung MBG.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menemukan bukti empiris yang cukup kuat untuk mendukung klaim bahwa MBG telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pengangguran terbuka di tingkat kabupaten selama periode 2022–2025. Hal ini bukan berarti MBG tidak memberi manfaat sama sekali program ini tetap memberi kontribusi nyata pada level mikro-lokal bagi pekerja dapur SPPG dan UMKM pemasok di sekitarnya melainkan bahwa skala operasionalnya masih terlalu kecil untuk terdeteksi pada indikator ketenagakerjaan agregat. Pola ini konsisten dengan temuan pada program bantuan sosial lain di Indonesia, yang cenderung lebih berperan sebagai peredam dampak pengangguran dan kemiskinan ketimbang sebagai solusi struktural atas persoalan pasar kerja.

Bagi Badan Pusat Statistik dan Badan Gizi Nasional, disarankan mempublikasikan data yang lebih granular dan konsisten mengenai jumlah dapur SPPG aktif serta tenaga kerja yang terserap pada level kabupaten/kota secara berkala. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, disarankan untuk tidak menggantungkan strategi penanggulangan pengangguran semata-mata pada program bantuan sosial nasional seperti MBG, melainkan memperkuat pelatihan vokasi dan keterampilan angkatan kerja agar selaras dengan kebutuhan sektor jasa dan industri bernilai tambah tinggi. Kerangka evaluasi berbasis data resmi yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat direplikasi pada kabupaten atau kota lain untuk menilai klaim dampak ekonomi program serupa secara lebih objektif.

DAFTAR REFERENSI

Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, *4*(3), 362–368. https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368

Andriany, V., Aprimayana, S., & Desfikasari, A. (2025). Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, *3*(4), 176–184. https://doi.org/10.54066/jrime.v3i4.3553

Anggiasari Alfirdani Putri & Muhammad Yasin. (2026). Analisis Struktur Industrialisasi Unggulan pada Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, *4*(2), 148–157. https://doi.org/10.61132/jepi.v4i2.2290

Antara News. (2025, Januari 6). *SPPG Karawang distribusikan 3.000 paket Makan Bergizi Gratis*. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4566550/sppg-karawang-distribusikan-3000-paket-makan-bergizi-gratis

Antara News Bengkulu. (2026, Februari 15). *Program Makan Bergizi Gratis serap hampir sejuta tenaga kerja lewat 21.000 dapur SPPG - ANTARA News Bengkulu*. Antara News. https://bengkulu.antaranews.com/berita/458862/program-makan-bergizi-gratis-serap-hampir-sejuta-tenaga-kerja-lewat-21000-dapur-sppg

Badan Gizi Nasional. (2026, Februari 3). *Survei BPS: Program Makan Bergizi Gratis Tekan Pengeluaran Rumah Tangga dan Ciptakan Lapangan Kerja*. Badan Gizi Nasional. https://bgn.go.id/news/berita/survei-bps-program-makan-bergizi-gratis-tekan-pengeluaran-rumah-tangga-dan-ciptakan-lapangan-kerja

BPS Kabupaten Karawang. (2023, November 20). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karawang Agustus 2023 sebesar 8,95 persen*. https://karawangkab.bps.go.id/en/pressrelease/2023/11/20/321/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--kabupaten-karawang--agustus-2023-sebesar-8-95-persen.html

BPS Kabupaten Karawang. (2024, Desember 4). *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Agustus Tahun 2024*. https://karawangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/05/323/keadaan-ketenagakerjaan-kabupaten-karawang-agustus-tahun-2024.html

BPS Kabupaten Karawang. (2025, November 10). *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Agustus 2025*. https://karawangkab.bps.go.id/en/pressrelease/2025/11/10/334/keadaan-ketenagakerjaan--kabupaten-karawang--agustus-2025.html

Dwijayanti, A. (2024). Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian. *Jurnal Administrasi Publik*, *20*(2), 281–308. https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.435

Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, *4*(1), 14–21. https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641

Gelli, A., Aurino, E., Folson, G., Arhinful, D., Adamba, C., Osei-Akoto, I., Masset, E., Watkins, K., Fernandes, M., Drake, L., & Alderman, H. (2019). A School Meals Program Implemented at Scale in Ghana Increases Height-for-Age during Midchildhood in Girls and in Children from Poor Households: A Cluster Randomized Trial. *The Journal of Nutrition*, *149*(8), 1434–1442. https://doi.org/10.1093/jn/nxz079

Idisi Online. (2025, Mei 2). *Yayasan Pangan Lestari Nusantara Pastikan UMKM Lokal Karawang Jadi Prioritas Program MBG – Idisi Online*. https://www.idisionline.com/2026/05/02/yayasan-pangan-lestari-nusantara-pastikan-umkm-lokal-karawang-jadi-prioritas-program-mbg

Kahar, A. M., Ramadani, A., Saputra, M. A., & Muhammad, A. F. (2025). Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Sekitar Sekolah Studi Kasus: Sma Negeri 2 Dan Sma Negeri 3 Makassar. *Vol* ., (5). https://www.eksopoda-publisher.com/index.php/JUNTER/article/view/238

Koton, Y. P., Nusi, D., & Djaba, M. (2025). Kontribusi Program Makanan Bergizi Gratis (Mbg) Terhadap Ekonomi Lokal Di Provinsi Gorontalo. *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)*, *2*. https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/P-JIAMS/article/view/410

Mursalin, I. A., Anggrayni, H. F., Viranda, Y. A., Rakhmanto, P. S., Ardhanie, N. D., & Martini. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Ekonomi Lokal Inklusif di Provinsi Bengkulu. *Solusi*, *24*(1), 93–112. https://doi.org/10.26623/slsi.v24i1.13399

Muttaqim, H., Halik, A., & Mujannah, S. (2025). Analisis Komprehensif Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Suku Bunga, dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode 2005-2023 Dengan Daya Beli Masyarakat sebagai Variabel Mediasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(2), 3948–3959. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7079

Pratiwi, Azijah, P. Z. S., & Zulva. (2025). *Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Pendapatan Sektoral dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia*. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168603

Pusat Investasi Pemerintah. (2025, Agustus 15). *PIP Dukung Program Makan Bergizi Gratis Melalui Pembiayaan Pembangunan SPPG - PIP DJPB Kemenkeu RI*. https://pip.kemenkeu.go.id/berita/174/pip-dukung-program-makan-bergizi-gratis-melalui-pembiayaan-pembangunan-sppg

Putri, D. A., Safitri, I. A., & Pramudita, R. (2025). Efektivitas Kebijakan Fiskal Dalam Menekan Tingkat Pengangguran Pasca Krisis Ekonomi Di Indonesia 2019-2024. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(11). https://doi.org/10.62281/1dajre95

Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari S, L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *5*(2), 130–137. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660

Raka, M. (2026, Mei 5). BPS: 103 Ribu Warga Karawang Masih Menganggur, Sektor Jasa Jadi Penyelamat. *Radar Karawang*. https://radarkarawang.id/bps-103-ribu-warga-karawang-masih-menganggur-sektor-jasa-jadi-penyelamat/

Ridha, M. R., Sinring, B., & Baharuddin, D. (2021). Pengaruh Bantuan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Parepare. *Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *4*(1), 75–81. https://doi.org/10.31850/economos.v4i1.782

Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, *1*(4), 1–13. https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317

Saputra, A., & Cita, F. P. (2023). Analisis Multiplier Effect Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2016-2020. *Nusantara Journal of Economics*, *5*(1), 38–47. https://doi.org/10.37673/nje.v5i1.2769

Sarjito, A. (2024). Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development Strategy to Support National Defence. *International Journal Administration, Business & Organization*, *5*(3), 129–141. https://doi.org/10.61242/ijabo.24.454

Sinaga, E., Lubis, T. A., & Situmorang, E. A. O. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *3*(2), 116–131. https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.416

Siti Fatimah Azzahra, Lystiana Dewi Putri, Fachriza Yunanda Purba, Dahri Tanjung, Ajeng Rezkitaputri, & Ratu Zaskia Daimatul Zulva. (2024). Dampak Pengangguran Terhadap Stabilitas Sosial Dan Perekonomian Indonesia. *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, *2*(4), 220–233. https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.719

Suardi, & Purmadani, A. S. (2025). *Makan Bergizi Gratis Dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi*. (1).

Sugiyono, S. (2019). Metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D. *Bandung: Cv. Alfabeta*, *69*. https://scholar.google.com/scholar?cluster=4406138268498236776&hl=en&oi=scholarr

Suriyati & Hendra Riofita. (2026). Pengendalian Pengangguran dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia Melalui Kebijakan Fiskal dan Moneter: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(4), 26199–26205. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6441

Syamsu, R. F., Putry, R. A., & Widyadhana, N. M. (2025). Tinjauan Nilai Gizi Dari Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Presiden Ri. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *6*(4), 14843–14853. https://doi.org/10.31004/jkt.v6i4.51554

Tsabitah, A. (2025). *Pengaruh Bantuan Sosial, Tingkat Pendidikan & Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam* [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/40614/

Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). *Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi Terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20023

Yeniwati, Y., Handra, H., & Yonnedi, E. (2025). Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, *19*(2), 261–274. https://doi.org/10.31869/mi.v19i2.6014